

**AKAD SEWA MENYEWA KENDARAAN OPERASIONAL
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

(Studi Pada PT Adi Sarana Armada dengan PT Columbus Multi Sarana)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

Rif'ad Fikri Hical

NPM: 1721030372

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

AKAD SEWA MENYEWA KENDARAAN OPERASIONAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

(Studi Pada PT Adi Sarana Armada (ASSA) dengan PT Columbus Multi Sarana)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

Rif'ad Fikri Hical

NPM: 1721030372

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing 1: Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

Pembimbing 2: Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021**

ABSRTRAK

Sewa menyewa merupakan solusi dalam memanfaatkan kenikmatan suatu barang jika keterbatasan dalam memiliki suatu barang tersebut. Salah satu contoh pihak yang melakukan sewa menyewa adalah PT Adi Sarana Armada (ASSA) dan PT Columbus Multi Sarana (Columbus). ASSA merupakan perusahaan yang menyediakan layanan sewa kendaraan untuk memenuhi kebutuhan operasional korporasi dan instansi pemerintah. Columbus merupakan perusahaan yang saat ini masih aktif menyewa kendaraan di ASSA. Sewa menyewa yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ASSA, dan segala ketentuan sewa menyewa tertuang dalam perjanjian sewa kendaraan yang telah disetujui oleh ASSA dan Columbus. Pada pelaksanaannya, Columbus mengembalikan kendaraan sebelum waktu yang telah disepakati. Upaya penyelesaiannya dengan mengganti biaya sewa dengan ketentuan pembayaran yang telah ditetapkan oleh ASSA.

Rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana akad sewa menyewa kendaraan operasional yang dilakukan oleh ASSA dan Columbus, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang mengganti biaya sewa dari pengembalian kendaraan sebelum waktu yang disepakati. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akad sewa menyewa kendaraan operasional yang dilakukan ASSA dan Columbus, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pengembalian kendaraan dengan dikenakan mengganti biaya sewa dari waktu sewa yang tersisa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis untuk mengkaji data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara dan sumber referensi dari dokumen maupun buku-buku yang terkait dengan penelitian ini. Pengolahan data melalui *editing*, *sistematic*, dan analisa data. Analisa data yang digunakan dengan pendekatan berfikir secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akad sewa menyewa kendaraan operasional dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ASSA dengan saling menyetujui isi perjanjian. Namun terdapat permasalahan pelaksanaan sewa yaitu pengembalian kendaraan sebelum waktu yang telah disepakati. Upaya penyelesaiannya dengan mengganti biaya sewa dengan ketentuan pembayaran sisa waktu sewa x (kali) 25% dari harga sewa perbulan. Tinjauan Hukum Islam tentang mengganti biaya sewa dari pengembalian kendaraan sebelum waktu yang disepakati tidak memenuhi unsur rukun dan syarat untuk mengambil manfaat dari objek yang disewakan, karena kendaraan telah dikembalikan namun diwajibkan membayar ganti biaya sewa. Sehingga sewa menyewa tersebut berakhir.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rif'ad Fikri Hical

NPM : 1721030372

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Akad Sewa Menyewa Kendaraan Operasional Dalam Tinjauan Hukum Islam** (Studi di PT Adi Sarana Armada dengan PT Columbus Multi Sarana)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis, bukan duplikasi ataupun hasil karya orang lain, kecuali pada bagian yang ditunjuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 06 Mei 2021
Penulis

RIF'AD FIKRI HICAL
NPM. 1721030372



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Letkol H. Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi mahasiswa:

Nama : Rif'ad Fikri Hical
NPM : 1721030372
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah
Judul : Akad Sewa Menyewa Kendaraan Operasional dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di PT Adi Sarana Armada dengan PT Columbus Multi Sarana)

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.
NIP. 197501292000031001

Pembimbing II

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Letkol H. Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Akad Sewa Menyewa Kendaraan Operasional dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di PT Adi Sarana Armada dengan PT Columbus Multi Sarana)”** disusun oleh Rif'ad Fikri Hical, NPM. 1721030372, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : 06 Mei 2021

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.

Penguji I : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

Penguji III : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

*“Dan penuhilah janji-janji, sesungguhnya janji itu akan
dimintai pertanggungjawabannya ”. (QS. Al- Isra:34)*



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT, ku persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahku dan Ibuku tersayang yaitu Ahmad Khotib dan Rohaina.

Terimakasih atas kasih sayang yang telah diberikan sejak aku kecil hingga saat ini, terima kasih selalu mendukung dan memenuhi segala kebutuhan untuk kebbaikanku, terimakasih yang selalu mendengarkan dan memberi saran atas keluh kesahku, terimakasih atas setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kesuksesanku. Tak ada yang bisa terbalaskan setiap jasa yang telah ayah dan ibu berikan.

2. Kakak-kakak kandung ku tersayang, Kak Yeni Elvia, Amd.Kep, Kak Annisa Lestari, S.Kom, Kak Andini Maulia, dan adikku tersayang Farhan Huda Wijaya, terimakasih atas semangat dan dukungan yang selalu diberikan.

3. Almamaterku tercinta Univesitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Rifʿad Fikri Hical, lahir pada tanggal 09 September 1998 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Ahmad Khotib dan Ibu Rohaina, S.Pd.I.

Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. TK Trisula 1 Perwari Bandar Lampung tahun 2004 dan lulus tahun 2005.
2. SDN 1 Rawa Laut Bandar Lampung tahun 2005 dan lulus tahun 2011.
3. MTs Negeri 1 Bandar Lampung tahun 2011 dan lulus tahun 2014.
4. MAN 2 Bandar Lampung tahun 2014 dan lulus tahun 2017.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Strata Satu Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah tahun 2017 dan lulus tahun 2021.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga skripsi ini yang berjudul “Akad Sewa Menyewa Kendaraan Operasional dalam Tinjauan Hukum Islam” (Studi di PT Adi Sarana Armada dengan PT Columbus Multi Sarana) telah terselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Aamiin.

Skripsi ini diselesaikan sebagai syarat guna menyelesaikan dan memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu syariah program Strata Satu Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Khususnya ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Mukri, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

4. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. dan Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing 1 dan 2 yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memotivasi serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen serta pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan melayani segala urusan akademik selama menjadi mahasiswa.
6. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung, yang telah menyediakan berbagai informasi dan referensi yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
7. Narasumber dari PT Adi Sarana Armada (ASSA) dan PT Columbus Multi Sarana yang telah memberikan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua dan saudara kandung yang selalu memberikan dukungan dan saran kepada penulis.
9. Rekan-rekan seperjuangan Muamalah kelas H Angkatan 2017 khususnya "BIGBOSS Squad" yang telah menemani suka duka dalam perkuliahan serta saling memberikan dukungan untuk menggapai kesuksesan.
10. Rekan rekan seperjuangan seluruh mahasiswa jurusan Muamalah angkatan 2017.

11. Teman-teman KKN-DR Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian.

Terimakasih telah menemani selama program KKN-DR di era pandemi *Covid-19*.

12. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun diharapkan demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga Allah SWT menjadikannya sebagai amal ibadah yang akan mendapat ganjaran disisi-Nya.



RIF'AD FIKRI HICAL
NPM. 1721030372

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Pustaka.....	9
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad dalam Islam	
1. Pengertian Akad	18
2. Dasar Hukum Akad.....	19
3. Rukun dan Syarat Akad	20
4. Macam-macam Akad	22
5. Asas-asas Akad	24
6. Pembatalan dan Berakhirnya Akad.....	26
B. Sewa Menyewa	
1. Pengertian Sewa Menyewa	27
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa	29
3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa.....	33
4. Macam-Macam Sewa Menyewa	39
5. Mekanisme Perjanjian Sewa Menyewa	39
6. Hikmah Sewa Menyewa	41
7. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa	42

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 - 1. PT Adi Sarana Armada (ASSA) 44
 - 2. PT Columbus Multi Sarana..... 56
- B. Akad Sewa Menyewa Kendaraan Operasional antara PT Adi Sarana Armada (ASSA) dengan PT Columbus Multi Sarana..... 62

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Akad Sewa Menyewa Kendaraan Operasional di PT Adi Sarana Armada (ASSA) dengan PT Columbus Multi Sarana..... 68
- B. Tinjauan Hukum Islam tentang mengganti biaya sewa dari pengembalian kendaraan sebelum waktu yang disepakati..... 73

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 78
- B. Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel

1.1	Harga Jenis Kendaraan Multi Purpose Vehicle.....	52
2.1	Harga Jenis Kendaraan City Car.....	53
3.1	Harga Jenis Kendaraan Four Wheel Drive/Sport Utility Vehicle..	53
4.1	Harga Jenis Kendaraan Pick Up.....	54
5.1	Harga Jenis Kendaraan Blind Van.....	54
6.1	Harga Jenis Kendaraan Truck.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu akan menguraikan dan menjelaskan istilah-istilah dari judul ini. Adapun judul yang dibahas adalah **Akad Sewa Menyewa Kendaraan Operasional dalam Tinjauan Hukum Islam** (studi di PT Adi Sarana Armada [ASSA] dengan PT Columbus Multi Sarana). Judul tersebut terdiri dari istilah pokok sebagai berikut:

1. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.¹
2. Sewa Menyewa adalah menyerahkan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk digunakan manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan.²
3. Kendaraan adalah sarana tertentu yang digunakan untuk melakukan kegiatan berpindah tempat terhadap manusia maupun barang dengan tujuan tertentu.³ Operasional adalah sesuatu yang menjadi pendukung segala kegiatan guna pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71

² Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 134.

³ Mikha Ekapasi Putra Kawagami, *Deskripsi Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Dampak Ekonomi dan Potensi Lakalantas*, Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan (JIEP), Vol. 17, No. 1, (Maret 2017)

Kendaraan Operasional adalah kendaraan yang dipakai oleh perusahaan untuk mendukung segala aktifitas perusahaan, proses distribusi produk, dan proses penting lainnya sehingga kendaraan perusahaan mempunyai peran vital dalam keberlangsungan rantai distribusi perusahaan.⁴

4. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).⁵
5. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang diperintahkan oleh Allah untuk hamba-Nya, dan disampaikan melalui rasul yang berisi aturan hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*), maupun aturan yang berhubungan dengan perbuatan (*'amaliyah*) yang dilakukan oleh semua umat muslim.⁶

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa judul dari skripsi ini adalah **Akad Sewa Menyewa Kendaraan Operasional dalam Tinjauan Hukum Islam** (Studi di PT Adi Sarana Armada dengan PT Columbus Multi Sarana) yang pelaksanaannya terdapat permasalahan yang terjadi diluar kontrak perjanjian.

B. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diridhoi oleh Allah SWT telah memberikan pedoman kepada manusia untuk menjalankan segala aspek

⁴Kendaraan, tersedia di: <https://www.freshconsultant.co.id/2019/09/17/manajemen-kendaraan-operasional-perusahaan>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020, pukul 19.00 WIB

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1470

⁶Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17, No.2, Tahun 2017, h. 24.

kegiatan baik dalam jasmani maupun rohani, perkara duniawi dan akhirat serta kegiatan berinteraksi dengan masyarakat. Berinteraksi dengan masyarakat tentunya manusia tidak akan terlepas dari berbagai kegiatan bermuamalah.

Kegiatan bermuamalah merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan serta telah diatur dalam kaidah fiqh-fiqh muamalah. Fiqh Muamalah merupakan aturan-aturan hukum Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi maupun urusan sosial kemasyarakatan. Hal ini menjelaskan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan manusia harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi, sebab segala aktivitas yang dilakukan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat.⁷

Salah satu kegiatan bermuamalah yang biasa dilakukan masyarakat adalah *ijarah* yang artinya praktik sewa menyewa. Sewa menyewa adalah salah satu cara untuk memperoleh manfaat dengan jalan penggantian berdasarkan ketentuan yang Allah tetapkan agar dalam melakukan kegiatan tersebut tidak memakan harta sesama secara batil. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS An-Nisa ayat 29 :

⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, (Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya) , 2010, h. 15.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalil ini menjelaskan bahwa segala aspek kegiatan bermuamalah terutama sewa menyewa diperbolehkan dalam islam dengan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.

Sewa menyewa dapat memicu timbulnya perjanjian dikalangan masyarakat dalam menjalankan roda perekonomiannya serta harus mematuhi hal hal yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Hal ini bertujuan agar masyarakat hidup dengan damai dan tidak ada persengketaan di masyarakat yang akan menimbulkan permasalahan. Sewa menyewa juga merupakan bentuk kepedulian sosial antar sesama masyarakat, karena dengan kegiatan sewa menyewa membuat sesuatu yang awalnya sulit menjadi mudah.

Kegiatan sewa menyewa telah banyak dikembangkan dalam masyarakat, salah satunya bisa dijadikan sebagai lahan usaha. Perkembangan kegiatan usaha saat ini mengalami perubahan ke arah hal yang lebih praktis, misalnya dengan menyewa kendaraan operasional yang artinya menggunakan kendaraan yang disewakan untuk menjalankan

kegiatan operasional perusahaan. Hal ini disebabkan karena tingginya harga suatu kendaraan dan banyaknya jumlah kendaraan yang dibutuhkan. Kebutuhan kendaraan dalam berbagai hal menuntut adanya kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup untuk mendukung berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kendaraan merupakan transportasi penting yang mempunyai pengaruh besar terhadap perorangan, pembangunan ekonomi, ataupun para pelaku usaha. Dengan adanya kendaraan bisa dijadikan sebagai sarana penunjang bagi pelaku usaha atau instansi pemerintah yang membutuhkan kendaraan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Kendaraan-kendaraan operasional di sejumlah instansi pemerintahan ataupun di kantor perusahaan yang digunakan untuk kebutuhan operasional tersebut bisa saja bukan merupakan milik instansi ataupun perusahaan yang bersangkutan. Kendaraan tersebut mereka sewa dari pihak penyewa yang menyediakan mobil, sehingga pada saat mobil akan dipakai, mobil selalu siap dalam keadaan bersih, bahan bakar penuh, dan kondisi mobil yang layak jalan. Bahkan jika terdapat mobil yang mogok, tersedia mobil pengganti yang siap menggantikan. Selain itu, bagian akutansi pun tidak lagi mengurus laporan keuangan perusahaan berupa laporan kekayaan usaha berupa kendaraan sebab kendaraan tersebut akan menua, karatan, dan menyusut. Jadi alternatif yang dipilih untuk memudahkannya dengan cara menyewa kendaraan operasional.

ASSA merupakan perusahaan swasta berbadan hukum yang kegiatannya menerapkan prosedur sewa menyewa kendaraan operasional untuk mendapat keuntungan. ASSA menyediakan solusi berbagai jenis mobil yang disewakan dengan variasi harga yang berbeda, sehingga para perusahaan atau instansi pemerintahan bisa memilih kendaraan sesuai dengan kebutuhannya. Columbus merupakan salah satu perusahaan swasta yang saat ini masih aktif terikat perjanjian sewa menyewa dengan ASSA.

Columbus menyewa sejumlah kendaraan operasional dengan waktu yang telah disepakati bersama. Namun sebelum melakukan penyewaan tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Columbus. ASSA menyurvei *point point* yang harus dipenuhi oleh Columbus untuk bisa melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut. Jika semua prosedur survei telah dilakukan dan Kepala Cabang ASSA telah menyetujui berdasarkan *point point* yang telah ditetapkan oleh ASSA, maka marketing dari ASSA meminta *Purchase Order* dari Columbus untuk mengisi hal hal seperti jenis dan tipe kendaraan ,jumlah kendaraan, harga sewa kendaraan, serta lamanya jangka waktu sewa.

Purchase Order dikirimkan dari Columbus ke ASSA, maka ASSA mulai memproses sistem dan *booking* unit untuk disewakan. Sebelum unit yang akan disewa tersebut dikirim ke Columbus, kedua pihak yaitu ASSA dan Columbus menyetujui dan menandatangani kontrak yang menyatakan telah setuju dengan isi kontraknya untuk melakukan sewa menyewa tersebut.

Kontrak yang mereka lakukan dengan cara melakukan perjanjian dengan satu atau sejumlah penyedia barang untuk melakukan pengadaan barang/jasa dengan menetapkan harga satuan (syarat dan kondisi untuk dilakukan transaksi sewa selama masa perjanjian berlaku). Kontrak tersebut biasanya ditemukan dalam perjanjian Pengadaan Barang atau jasa, misalnya jasa layanan perjalanan (*travel agent*), pengadaan material, pengadaan alat tulis kantor (ATK), serta pengadaan kendaraan dinas. Kontrak perjanjian ini juga memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu⁸:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses serta administrasi pengadaan.
2. Menjamin ketersediaan supply untuk jenis barang/jasa yang tertentu atau yang bersifat mendesak.
3. Ter-standarisasinya proses pengadaan atau spesifikasi barang/jasa yang dicantumkan dalam kontrak perjanjian.
4. Mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah atau perusahaan
5. Meningkatkan kemampuan industri dalam menyediakan kebutuhan pemerintah atau perusahaan.

Walaupun telah ada kontrak yang mengikat perjanjian sewa menyewa kedua pihak tersebut, ternyata masih terdapat permasalahan yang terjadi diluar kontrak perjanjian tersebut.

Permasalahan itu adalah pengajuan berakhirnya sewa sebelum waktu yang telah ditentukan dengan mengembalikan kendaraan sebelum waktu

⁸ *Pengadaan barang*, tersedia di: <https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/07/kontrak-payung.html>, di akses pada tanggal 28 Juni 2020, Pukul 13.00 WIB

yang disepakati. Hal ini bisa disebabkan saat perusahaan mengalami penurunan produksi penjualan dan pendapatan, sehingga tidak berjalan lagi kendaraan operasional yang mereka sewa, maka diajukan berakhirnya sewa. Sifat sewa menyewa seperti ini menimbulkan hal hal yang terjadi diluar kontrak perjanjian. Maka penelitian ini akan difokuskan pada masalah yang terjadi dalam akad sewa menyewa kendaraan operasional yang dilakukan PT ASSA dengan PT Columbus Multi Sarana

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan penjabaran mengenai akad sewa menyewa kendaraan operasional yang dilakukan PT Adi Sarana Armada (ASSA) dengan PT Columbus Multi Sarana dilihat dari tinjauan hukum islam.

Subfokus penelitian ini adalah adanya permasalahan mengenai pengembalian kendaraan yang disewa sebelum waktu yang telah disepakati dan dikenakan biaya ganti sewa dari waktu sewa yang tersisa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Akad Sewa Menyewa Kendaraan Operasional yang dilakukan oleh PT ASSA dengan PT Columbus Multi Sarana?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang mengganti biaya sewa dari pengembalian kendaraan sebelum waktu yang disepakati?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Akad Sewa Menyewa Kendaraan Operasional yang dilakukan oleh PT ASSA dengan PT Columbus Multi Sarana
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang mengganti biaya sewa dari pengembalian kendaraan sebelum waktu yang disepakati

F. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian tentang tinjauan hukum islam tentang akad sewa menyewa kendaraan operasional yang dilakukan oleh PT ASSA dengan PT Columbus Multi Sarana dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya terkait tentang hukum islam.

2. Secara Praktis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana sewa menyewa kendaraan operasional dalam tinjauan hukum islam.

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas mengenai suatu penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti lain yang menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau

duplikasi dari penelitian yang telah ada. Guna mendukung penelitian ini maka penulis telah melakukan pencarian ke berbagai literatur yang ada, diantaranya:

1. Gesta Gama Sevia, Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2019 dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam tentang Biaya Tambahan Keterlambatan Pengembalian Sewa Menyewa Kendaraan (Studi pada CV Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung)”. Permasalahan dari penelitian ini adalah biaya tambahan bagi penyewa yang terlambat dalam pengembalian kendaraan yang telah disewa. Penelitian ini jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dalam Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Keterlambatan Pengembalian Sewa-Menyewa Kendaraan Pada CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung tidak melanggar ketentuan yang disyariatkan sebab pengenaan biaya tambahan bagi penyewa yang terlambat mengembalikan kendaraan sewaan tidak mengandung unsur riba.⁹

2. Regina Maya Sherly, Mahasiswi IAIN Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2018 dengan judul: “Penyesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Mobil dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus M 16 Renka, 16C Metro

⁹ Gesta Gama Sevia, “Tinjauan Hukum Islam tentang Biaya Tambahan Keterlambatan Pengembalian Sewa Menyewa Kendaraan (Studi pada CV Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung)” 27 Desember 2019, Publisher Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, h. 2

Barat)”. Permasalahannya adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa mobil diantaranya terlambat mengembalikan mobil yang telah disewa, menggadai mobil tersebut tanpa adanya sepengetahuan dari pemilik mobil. Penelitian ini jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian wanprestasi dilakukan secara damai antara pemilik dan penyewa dimana si penyewa telah membayar denda dan mengganti kerusakan mobil yang sesuai dengan perjanjian. Hal ini telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menggunakan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang disebut Ash Sulh (perdamaian), yang mengakhiri akad perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak antara pemilik dan penyewa.¹⁰

3. Mohamad Yoga Al Khozi, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah Jurusan Ilmu Hukum Tahun 2018 dengan judul : “Tanggung jawab penyewa pada terjadinya *Overtime* dalam sewa menyewa mobil (Studi Kasus Jaya Transport Rent Car, Tour & Travel)”. Permasalahannya adalah terjadi wanprestasi bagi penyewa mobil yang digunakan untuk mencuri dan mengakibatkan mobil ditahan sebagai barang bukti sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik rental mobil. Penelitian ini jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif.

¹⁰ Regina Maya Sherly, “Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Mobil dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus M 16 Renka, 16C Metro Barat)”, Januari 2018, Publisher Jurusan Muamalah IAIN Metro.

Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian kasus wanprestasi dilakukan dengan cara musyawarah antara penyewa dan pemilik mobil dengan membuat surat perjanjian bermaterai dan jaminan sebuah sertifikat tanah milik penyewa dan harus bertanggung jawab atas ganti rugi yang telah dilakukan.¹¹

Berdasarkan kajian pustaka yang telah diuraikan tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian yang saat ini sedang lakukan yaitu mengenai sewa menyewa kendaraan khususnya penyewaan mobil. Namun dalam hal ini tetap ada perbedaan yang signifikan yaitu subjek yang melakukan perjanjian sewa, aturan dalam menyepakati perjanjian sewa, permasalahan yang terjadi saat perjanjian sewa, serta penyelesaian dari permasalahannya.

Pada skripsi ini penulis memfokuskan pada akad sewa menyewa kendaraan operasional dalam tinjauan hukum islam yang dilakukan oleh PT Adi Sarana Armada (ASSA) dengan PT Columbus Multi Sarana di Bandar Lampung yang terdapat permasalahan dalam pengembalian kendaraan sebelum waktu yang telah disepakati dengan upaya penyelesaian dengan mengganti biaya sewa dari waktu sewa yang tersisa.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi serta mencakup

¹¹ Mohamad Yoga Al Khozi, "Tanggung jawab penyewa pada terjadinya *Overtime* dalam sewa menyewa mobil (Studi Kasus Jaya Transport Rent Car, Tour & Travel)". 20 Februari 2018, Publisher Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta h. 2.

alat dan prosedur penelitian.¹² Berikut akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang berdasarkan kenyataan di lapangan dalam keadaan yang sebenarnya. Selain penelitian lapangan, penelitian ini menggunakan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan dari referensi buku, jurnal media elektronik, internet, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di PT Adi Sarana Armada (ASSA) Cabang Lampung serta wawancara yang dilakukan di PT Columbus Multi Sarana.

3. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam yaitu :

¹²Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), h. 111

a. Data Primer

Data diperoleh dari hasil observasi di ASSA yang merupakan penyedia layanan sewa kendaraan operasional perusahaan serta Columbus sebagai penyewa kendaraan.

b. Data Sekunder

Sumber data penelitian yang diperoleh secara peneliti melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, serta arsip-arsip perusahaan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari beberapa individu yang karakteristiknya akan diteliti dan akan ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah PT Adi Sarana Armada (ASSA) dan PT Columbus Multi Sarana cabang Bandar Lampung. Sampel yang diambil 2 orang dari ASSA dan 2 orang dari Columbus.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan metode melalui tahapan pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen.¹³

a. Observasi

Melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹⁴

¹³ Susiadi, AS., *Metode Penelitian* (Bandar Lampung : LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 106.

¹⁴ Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), h. 58.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data yang dilakukan kedua belah pihak baik peneliti maupun narasumber yang terpercaya dengan mengajukan langsung pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.¹⁵

c. Dokumentasi

Memperoleh kelengkapan data melalui dokumentasi ataupun catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian.

6. Metode Pengolahan Data

Langkah pengolahan data yang telah terkumpul sebagai berikut:

a. Editing

Pengoreksian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengecek data yang terkumpul sudah benar dan lengkap serta sesuai dengan permasalahan.

b. Sistematisasi

Menetapkan data berdasarkan kerangka sistematika bahasa dengan fokus pada urutan masalah. Data dikelompokkan secara sistematis menurut klasifikasi dan urutan masalah.

¹⁵Newman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta, 2013), h. 49.

7. Metode analisis data

Analisis data adalah proses menganalisa terhadap data yang dikumpulkan melalui perangkat metodologi tertentu.¹⁶ Langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan berdasarkan dari data yang terkumpul dan menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara bertahap yang disesuaikan dengan kajian penelitian akad sewa menyewa kendaraan operasional dalam tinjauan hukum islam dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Metode berfikir Induktif adalah cara analisis dari sebuah teori umum dan dibandingkan dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan untuk diuji kebenarannya serta digunakan dalam mengambil kesimpulan akhir.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi pembahasan dalam lima bab, setiap sub-sub bab terdiri dari:

BAB I menguraikan penerapan proposal yang berisi tentang pendahuluan. Penulis mendeskripsikan mengenai penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁶ Buhran Bungain, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 196.

BAB II membahas tentang landasan teori tentang akad dalam islam yang meliputi pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, asas-asas akad, dan berakhirnya akad. Serta pembahasan teori tentang sewa menyewa dalam islam yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam, mekanisme perjanjian sewa, hikmah sewa menyewa, dan berakhirnya sewa-menyewa.

BAB III membahas tentang deskripsi objek penelitian yang meliputi profil dari ASSA dan Columbus, serta prosedur akad sewa menyewa kendaraan operasional yang dilakukan oleh ASSA dan Columbus.

BAB IV membahas tentang analisis data dari akad sewa menyewa kendaraan operasional yang dilakukan oleh ASSA dan Columbus serta analisis tinjauan hukum islam mengenai akad sewa menyewa kendaraan operasional yang dilakukan oleh ASSA dan Columbus.

BAB V penutup yang berisi kesimpulan dari rumusan masalah serta saran dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad dalam Islam

1. Pengertian Akad

Perjanjian merupakan perikatan yang secara sengaja dibuat secara tertulis sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan dalam melakukan suatu penawaran ataupun penerimaan yang berakibat pada konsekuensi hukum tertentu. Dalam Fiqh Muamalah, perjanjian masuk dalam bab pembahasan akad. Akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan kegiatan bermuamalah.¹⁷

Secara Etimologi akad berasal dari bahasa arab kata *al-'aqad* yang berarti mengikat, ikatan, dan tali ikat.¹⁸ Secara terminologi dalam istilah hukum islam akad adalah kesepakatan untuk terjadinya perpindahan kepemilikan dari suatu pihak yang melakukan ijab kepada pihak lain yang menyatakan qabul.¹⁹

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan akad merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa pihak baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam hal perpindahan kepemilikan suatu objek agar bisa digunakan dengan sebaik-baiknya serta dapat membangun rasa kepercayaan satu sama lain.

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,.....,h. 71.

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 35

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 51.

2. Dasar Hukum Akad

a. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Maidah:1)

Ayat ini menjelaskan untuk melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

b. Ali-Imran ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang termasuk disukai oleh Allah adalah orang yang bertakwa serta menepati janji sesama manusia maupun terhadap Allah.

c. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا لُؤِثُمْ خَانَ (رواه البخار و مسلم)²⁰

²⁰ Ahmad Ibnu Hanbal Abu ‘Abdullah Asy-Asyaibani, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jilid 2 h. 189.

“Dari Abdillah bin Amr, Nabi Muhammad SAW bersabda, Tanda orang munafik itu ada tiga: yaitu jika berbicara berdusta, jika berjanji maka tidak menepati, dan jika diberi amanah, dia berkhianat.” (HR. Bukhari no. 33 dan Muslim no. 59).

Hadits ini menjelaskan jika seseorang berjanji dan tidak menepati janjinya, maka dia termasuk orang yang munafik. Maka dari itu kita wajib menepati janji yang kita buat.

3. Rukun dan Syarat Akad

Rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan.²¹ Akad akan terbentuk apabila semua rukunnya terpenuhi. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad hanya ijab dan qabul.²² Adapun rukun akad sebagai berikut:²³

a. Para pihak yang mengadakan akad (*'aqidain*)

Orang yang berakad atau yang membuat kesepakatan disebut *aqid*. *'Aqid* merupakan subjek akad. *'Aqid* bisa berupa perorangan dan bisa juga berbentuk badan hukum.

b. Ijab qabul (*Sighat akad*)

Serah terima yang menunjukkan kesepakatan kedua pihak yang berakad. Ijab qabul menghendaki pihak yang berakad.²⁴

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), Cet Ke-1, h.114.

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 95

²³ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2010), Cet Ke- 1, h. 180.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 429

c. Objek Akad (*Ma'qud alaih*)

Objek akad adalah benda-benda yang digunakan dalam kesepakatan.

d. Tujuan Akad

Para pihak yang berakad memiliki tujuan pokok dalam mengadakan akad. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

Akad juga memiliki syarat umum yang ditentukan oleh syara' untuk melakukannya. Syarat-syarat tersebut terdiri dari :

- a. Pihak yang melakukan akad cakap bertindak, jika akad dilakukan oleh orang yang tidak cakap, maka akad nya tidak sah.²⁵
- b. Pelaksanaan akad dan objek akad harus ada manfaatnya.
- c. Akad yang diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan pemilik objek akad.
- d. Akad bukan jenis akad yang dilarang oleh syara'.²⁶
- e. Ijab harus berjalan terus, ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qabul.²⁷

Ulama Fiqh menetapkan apabila sudah terbentuk rukun dan syaratnya, namun harus dipenuhi beberapa kualifikasi lagi untuk sahnya akad, yaitu:

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 2014), h. 117.

²⁶ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Riau: Suska Press, 2008), h. 35.

²⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 32

- a. Bebas dari gharar
- b. Bebas dari kerugian
- c. Bebas dari riba

Apabila akad telah memnuhi rukun dan syaratnya dan terhindar dari segala perkara yang menimbulkan kemudhorotan, maka akad mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukannya.

4. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh berpendapat bahwa akad dapat dibagi yang terdiri dari:

- a. Akad dilihat dari segi keabsahannya, terdiri dari 2 macam yaitu:

- 1) *Akad Shahih*, yakni akad yang telah terpenuhi seluruh rukun dan syaratnya sehingga berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dan mengikat bagi pihak yang melakukan akad.

Ulama hanafi membagi 2 jenis *akad-shahih*, yaitu:²⁸

- a) *Akad Nafiz*, adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya, dan tidak ada pula penghalang pelaksanaan akadnya.
- b) *Akad Mauquf*, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di langsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz.

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*...., h. 20.

2) Akad tidak *shahih*, yakni akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum perjanjian itu tidak berlaku dan tidak mengikat bagi pihak yang melakukan akad.²⁹ Akad ini juga tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek akad, sehingga akad ini dianggap batal. Ulama Hanafi dan maliki membagi akad tidak shahih ini menjadi 2 macam yakni:

a) *Akad Fasid*, adalah akad yang menurut syara' hukumnya sah yakni telah terpenuhi rukun dan syaratnya namun tidak sah akan sifatnya. Misalnya, akad jual beli kendaraan, namun merk dan kualitas kendaraan tersebut tidak disebutkan. Pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan antar pihak yang melakukan akad.

b) *Akad Bathil*, adalah akad yang tidak terpenuhi salah satu rukun maupun syaratnya dan tidak sah akan sifatnya. Misalnya, objek akad jual beli yang tidak jelas seperti menjual janin hewan yang masih dalam kandungan induknya. Sehingga akad ini mengandung ketidakjelasan.

Mayoritas Ulama Fiqh, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat *akad fasid* dan *akad bathil* merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, sehingga akad ini tidak menimbulkan akibat hukum apapun.

²⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h. 36.

b. Akad dilihat dari segi tujuannya, terdiri dari 2 macam yaitu³⁰ :

- 1) *Akad Tabarru*, adalah akad yang dimaksudkan tidak mencari keuntungan karena mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT. Misalnya akad yang dilaksanakan untuk Hibah, Wakaf, Wakalah, dsb.
- 2) *Akad Tijari*, adalah akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan, namun rukun dan syaratnya harus terpenuhi. Misalnya akad yang dilaksanakan untuk *Murabahah*, *Mudhorobah*, *Ijarah*, *Musyarokah*.

5. Asas-Asas Akad

Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas akad yang berpengaruh pada pelaksanaan akad oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan akad, maka akan berakibat batal atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat. Adapun asas-asas akad diantaranya sebagai berikut:

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.³¹ Dengan adanya kata sepakat antara pihak yang berakad maka telah memenuhi asas konsensualisme.

³⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,....., h. 77.

³¹*Ibid*, h. 78.

b. Asas Kebebasan Berakad

Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, dengan tujuan untuk menjaga agar tidak terjadi saling mendzalimi antara sesama manusia melalui perjanjian yang dibuatnya.³²

c. Asas Keadilan

Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.³³

d. Asas Kejujuran

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak yang berakad.³⁴

e. Asas Tertulis

Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu akad dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan akad dan yang menjadi saksi.³⁵

³²*Ibid*, .h.84.

³³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet ke- 2, h. 94

³⁴*Ibid*, 97

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,, h. 98.

6. Pembatalan dan Berakhirnya Akad

Ada beberapa sebab pembatalan akad yang disebabkan karena dibatalkannya ijab, yaitu sebagai berikut:³⁶

- a. Pembatalan yang dilakukan oleh pembuat ijab.

Menurut para ulama, ijab bisa dibatalkan sebelum pihak yang akan menerima belum menerima objek akad.

- b. Penyimpangan dari pihak yang berakad.

Salah satu pihak melakukan suatu penyimpangan diluar kontrak perjanjian. Apabila salah satu pihak terbukti melakukan penyimpangan tersebut, maka perjanjian bisa dibatalkan.³⁷

Adapun pembatalan akad harus melalui prosedur yang dibenarkan oleh syariat islam dengan cara sebagai berikut:

- a. Memberitahukan adanya pembatalan akad yang dilakukan oleh pihak yang berakad.
- b. Mengemukakan alasan-alasan mengenai pembatalan akad beserta dengan buktinya.³⁸
- c. Saling berkomunikasi mengenai upaya penyelesaian dari pembatalan akad.

Apabila pembatalan tersebut dilakukan secara sepihak ataupun tanpa adanya persetujuan dari pihak lain yang melakukan akad tersebut, maka akadnya dinyatakan masih memiliki ikatan hukum antara kedua belah

³⁶ Asep Saefuddin Jahar et.al, *Hukum Keluarga, Pidana, Bisnis*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 262-263.

³⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam Cet-III*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 6

³⁸ *Ibid*, h. 7

pihak sampai berakhirnya akad. Akad bisa berakhir yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:³⁹

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau *rukyat*.
- c. Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

B. Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa

Secara bahasa, sewa menyewa berasal dari bahasa arab yakni *al-ijarah* yang berasal dari kata *al-arju*, yang arti menurut bahasanya adalah *al-iwadh*, artinya adalah ganti dan upah.⁴⁰ Sebelum dijelaskan lebih lanjut mengenai sewa menyewa, terlebih dahulu akan dikemukakan makna operasional *ijarah* secara umum. *Ijarah* bisa disebut sewa atau upah.

Sewa biasanya digunakan untuk benda yang diambil manfaatnya, dan waktu pembayaran imbalannya pada awal menerima objek sewa. Sedangkan upah untuk memberikan bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan setelah pekerjaan selesai.⁴¹

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 58-59.

⁴⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 133.

⁴¹ *Ibid*, h. 141.

Secara istilah, pengertian *ijarah* adalah suatu kontrak pertukaran antara suatu manfaat dengan ganjaran atau bayaran tertentu.⁴² *Ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu dalam waktu tertentu.

KUHPerdata menjelaskan sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak penyewa.⁴³

Menurut istilah Bank Indonesia, *ijarah* adalah sewa-menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa,⁴⁴

Menurut para Ulama Fiqh, definisi *ijarah* dikemukakan sebagai berikut :

a. Menurut Ulama Hanafi dan syafi'i :

Ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang bisa diambil dari barang ataupun jasa yang dijual dengan hanya mengambil kemanfaatannya tidak untuk dimiliki dan diganti dengan imbalan.

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, h. 247.

⁴³ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013, Cet-8, h. 373

⁴⁴ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika 2012), h. 151 .

b. Menurut Ulama Maliki dan Hanbali :

Ijarah adalah akad atas menjual kemanfaatan suatu barang maupun jasa dengan waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati kedua belah pihak.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan *ijarah* adalah akad untuk mengambil manfaat suatu benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang diterima dari pemilik benda dengan jalan melalui pembayaran sewa atau upah sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa

a. Berikut ini yang menjadi dasar hukum diaturnya konsep sewa menyewa dalam Al Qur'an:

1) Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan,

Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah:233)

Inti dari ayat ini terdapat dalam arti jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu untuk memberikan pembayaran. Hal ini menjelaskan tentang pemberian upah kepada seseorang yang memberikan jasanya kepada kita dengan pemberian upah yang sepantasnya dari jasa yang telah dilakukan.

2) Al Qashash ayat 26-27:

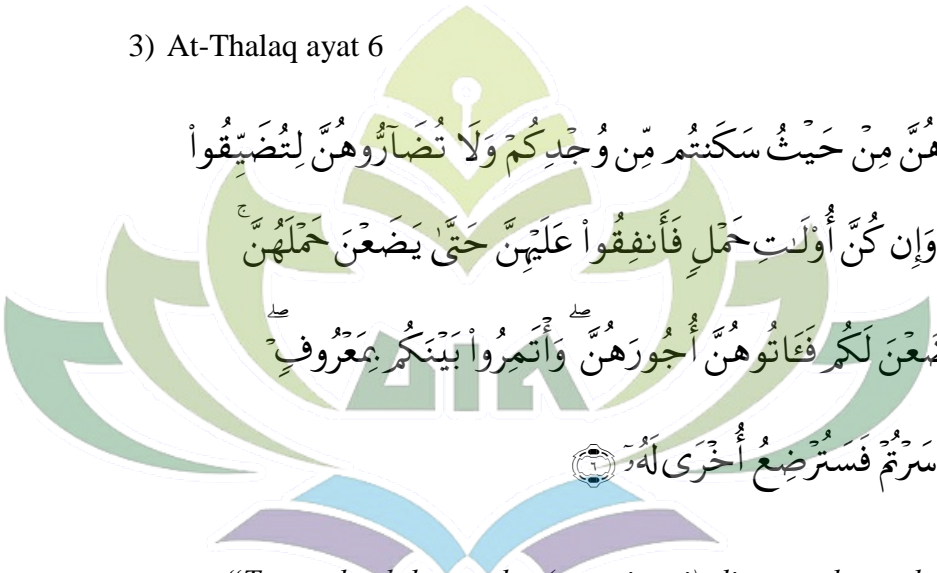
قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ اسْتِجْرَاهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ
 أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

26. “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

27. “Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".(Al Qashash ayat 26-27).

Ayat ini menjelaskan seseorang yang bisa memberikan tenaga dalam bekerja pada orang lain haruslah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dan berikan upah kepada orang sesuai kesepakatan.

3) At-Thalaq ayat 6



أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمُتْرَضِعُ أُخْرَى لَهُ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (At-Thalaq:6)

Ayat ini menjelaskan pemberian upah terhadap suatu pekerjaan hendaklah dimusyawarahkan dan di sepakati terlebih

dahulu antara kedua belah pihak, agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan terhadap pihak yang lain.

Berdasarkan ketiga ayat yang telah disebutkan di atas, menjelaskan tentang pemberian upah terhadap para pekerja yang melakukan pekerjaan kepada yang memerlukan keahlian mereka. Artinya perintah pemberian upah tersebut perintah langsung dari Allah yang telah dituliskan dalam Al- Qur'an.

Ini menjadi dasar bahwa dalam ketentuan *ijarah* telah disyari'atkan baik dari segi upah yang menjadi salah satu syarat sewa menyewa, maupun dari segi objek sewa menyewa yang dapat berupa barang dan pekerjaan atau jasa inilah yang menjadi dasar hukum di perbolehkannya *ijarah* dalam kehidupan.

b. Berikut ini dasar hukum sewa menyewa dalam Hadits Nabi:

Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar:

عَنْ بَنِي عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُعْطُوا لَا جَيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)⁴⁵

“Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda berikanlah kepada tenaga itu upahnya sebelum keringatnya kering”.

Kedua *hadits* ini menjelaskan membayar upah atau imbalan atas pekerjaan seseorang atau objek yang disewakan harus sesuai dan diberikan dengan segera.⁴⁶

⁴⁵ Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram* (Bandung: Sygma Publishing, 2011). Hadist No. 1049, h. 42.

c. Berikut ini dasar hukum sewa menyewa menurut ijma para ulama:

Para ulama' berpendapat *ijarah disyari'atkan* dalam islam, karena *ijarah* atau sewa-menyewa adalah salah satu media yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Umat Islam pada masa sahabat Rasulullah pun telah beijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁴⁷

Tujuan dibolehkannya *ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, di pihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang, sehingga dengan *ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan dan mendatangkan manfaat.⁴⁸

Beberapa uraian dasar hukum tersebut, sangat mustahil apabila manusia dapat mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya, karena itu bisa dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang saling membantu, berlandaskan asas tolong-menolong yang telah dianjurkan oleh islam.

3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

Ada perbedaan pendapat para ulama fiqh mengenai rukun sewa menyewa. Pendapat pertama dari ulama Hanafi yang mengemukakan

⁴⁶ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa dan Umum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 167.

⁴⁷ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 124.

⁴⁸ Abdur Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 278.

bahwa rukun sewa menyewa hanyalah ijab qabul saja.⁴⁹ Dengan adanya ijab qabul atau serah terima dalam persetujuan antar kedua pihak, maka sah transaksi sewa menyewa tersebut.

Pendapat kedua dari ulama Syafi'i, Maliki, dan Hanbali mengemukakan bahwa rukun dari sewa menyewa adalah *Mu'jir musta'jir, sighat, ma'qud alaih* yang ada manfaatnya, serta *Ujrah*/imbalan.

Berdasarkan kedua pendapat beberapa ulama di atas dapat disimpulkan rukun ijarah diantaranya sebagai berikut :

a. Adanya pihak yang berakad

Pihak yang melakukan *ijarah* disebut *Mu'jir* dan *Musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menyewakan barangnya atau jasanya dengan menerima imbalan dari objek yang disewakannya, sedangkan *musta'jir* adalah penyewa yang menggunakan barang sewa dan membayar sejumlah uang untuk biaya sewa.

b. Adanya ijab dan qobul.

Pernyataan serah terima atau kesepakatan antara kedua pihak untuk melakukan sewa menyewa baik berupa perkataan, tulisan, maupun dalam bentuk lainnya.

⁴⁹M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.

c. Adanya *Ma'qud alaih*.

Ma'qud alaih adalah objek yang disewakan dan harus ada manfaatnya. Objek yang kemanfaatannya tidak dibolekan oleh hukum agama tidak sah dan wajib ditinggalkan.⁵⁰

d. Adanya *Ujrah*

Ujrah adalah upah atau imbalan yang dibayarkan dari *musta'jir* kepada *mu'jir* berupa biaya dari objek yang telah disewakan.

Adapun syarat-syarat *ijarah* yang harus dipenuhi untuk melakukan akad *ijarah* adalah syarat dari rukun *ijarah* yang telah dikemukakan oleh ulama, yaitu:⁵¹

a. Syarat Orang berakad

Syarat bagi yang berakad adalah *baligh*, berakal, dan cakap dalam melakukan akad sewa menyewa. Ulama berbeda pendapat mengenai syarat bagi orang yang berakad yaitu *Mu'ajir* dan *musta'jir* dalam melakukan akad *ijarah*, diantaranya yaitu:

- 1) Ulama Hanafi berpendapat orang yang melakukan akad disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus *baligh*. Akan tetapi, jika barang bukan miliknya sendiri akad *ijarah* anak *mumayyiz* dipandang sah apabila telah diizinkan walinya.
- 2) Ulama Maliki berpendapat bahwa anak *mumayyiz* sah melakukan *ijarah* tetapi bergantung atas ridho dari walinya.

⁵⁰ Suhrawardi K Lubis Dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), h. 158.

⁵¹ Harun, Fiqh Muamalah (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), h. 124.

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas mengenai syarat untuk orang yang berakad dalam ijarah dapat disimpulkan bahwa, diwajibkan bagi *Mu'jir* dan *Musta'jir* mencapai usia *baligh* dan berakal sehingga dapat melakukan transaksi sewa menyewa dengan keadaan yang baik dan dapat membedakan mana hal yang baik dan buruk ketika melakukan kegiatan sewa menyewa.

Setelah syarat *baligh* dan berakal telahenuhi, maka hendaklah mereka saling merelakan dan meridhoi sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 29. Jadi antara *mu'air* dan *musta'jir* tidak ada unsur paksaan sehingga terciptanya kata sepakat.

Selain syarat tersebut, dijelaskan juga hak dan kewajiban dari *mu'jir* dan *musta'jir*. Haknya seorang *Mu'jir* adalah mendapat imbalan atau upah terhadap sewa atau jasa yang telah diberikan. Sedangkan kewajibannya terdiri dari :

- 1) Menyediakan objek sewa dengan baik.
- 2) Melakukan pemeliharaan terhadap objek yang disewakan.
- 3) Memastikan objek sewa dalam keadaan baik dan dapat digunakan dengan baik.
- 4) Memberikan hak sepenuhnya kepada *musta'jir* untuk menggunakan objek sewa.
- 5) Mematuhi seluruh ketentuan sewa menyewa yang telah disepakati selama pelaksanaan akad ijarah berlangsung.

Adapun hak dari *Musta'jir* adalah menerima objek sewa atau jasa dari *mu'ajir* secara untuk digunakan manfaatnya. sedangkan kewajibannya terdiri dari :

- 1) Menggunakan objek sewa dengan sebaik-baiknya.
- 2) Melakukan pemeliharaan terhadap objek yang disewakan.

Dalam artian menjaga dan bertanggung jawab atas objek sewa

- 3) Membayar harga sewa atau upah yang telah disepakati bersama.

- 4) Mengembalikan objek sewa apabila jangka waktu sewa telah habis.

- 5) Mematuhi seluruh ketentuan sewa menyewa yang telah disepakati selama pelaksanaan akad *ijarah* berlangsung

b. Syarat *Sighat* (Ijab Qabul)

Ijab qabul *ijarah* adalah ungkapan serah terima antar *mu'ajir* dengan *musta'jir* dalam melaksanakan sewa menyewa. Adapun syarat *sighat* adalah :

- 1) Harus jelas dalam pelafalan ijab dan qabul. Jelas dalam artian menyebutkan hal-hal yang harus disepakati selama perjanjian sewa menyewa.
- 2) Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul dalam perjanjian sewa menyewa untuk menghindari terjadinya kesalah-pahaman diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari.

- 3) Harus memperlihatkan dan benar-benar dalam keadaan rela dan ridho yang berarti tidak ada paksaan dalam melakukan sewa menyewa.

c. Syarat Objek Sewa

Objek yang akan disewakan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Objek yang disewakan dapat diambil manfaatnya dan sesuai dengan kegunaannya secara mubah.
- 2) Objek yang disewakan dapat diserahkan kepada penyewa berikut dengan kegunaannya.
- 3) Objek yang disewakan adalah perkara yang diketahui secara jelas serta mubah menurut aturan hukum islam.
- 4) Objek yang disewakan bukan perkara yang dilarang menurut hukum islam.

d. Syarat *Ujrah* yang ditetapkan dalam *Ijarah*.

Adapun syarat ujrah atau upah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- 2) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap, yaitu manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa-menyewa.

- 3) Manfaat untuk seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.

4. Macam-macam Sewa Menyewa

Sewa Menyewa dalam islam dibagi menjadi 2 macam yaitu:

a. *Ijarah bil Manfa'ah*

Sewa menyewa dengan mengambil manfaat dari barang yang disewakan seperti, rumah untuk ditempati, ruko yang digunakan untuk transaksi jual beli, mobil untuk dikendarai, dsb.

Ijarah jenis ini tidak diperbolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat untuk dimanfaatkan dalam hal yang dilarang oleh islam.⁵²

b. *Ijarah bil Amali*

Ijarah yang objeknya adalah pekerjaan atau jasa dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dan dibayar dengan upah, seperti membangun sebuah rumah, mencuci kendaraan, dsb. Menurut para ulama ijarah jenis ini hukumnya mubah asalkan pekerjaan itu jelas dan tidak dilarang dalam islam.

5. Mekanisme Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian sewa menyewa terjadi karena adanya kesepakatan kedua belah pihak antara pihak mu'sta'jir (penyewa) mengikatkan diri untuk

⁵² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*..., h. 84.

menikmati barang yang disewakan dan pihak *mu'jir* (pemilik sewa) menerima pembayaran uang. Kedua pihak menyepakati jangka waktu yang ditentukan dengan pembayaran sesuai harga yang disanggupi dilakukan perjanjian lisan ataupun tertulis.⁵³

Dalam proses nya perjanjian sewa menyewa kedua belah pihak harus membuat suatu perjanjian agar tidak ada kesalahpahaman untuk kedepan nya, adapun syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian yaitu:⁵⁴

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk mebuat suatu perjanjian.
- c. Suatu hal teretntu dan suatu sebab yang tidak terlarang.
- d. Adanya syarat dan ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa
- e. Adanya subjek dan objek yang jelas dalam sewa menyewa
- f. Adanya hak dan kewajiban pihak yang menyewakan dan hak kewajiban pihak penyewa.
- g. Apabila kedua belah pihak setuju akan perjanjian tersebut, maka terjadinya kesepakatan itu dalam bentuk kontrak yang sudah disepakati.

⁵³ Waty Tarigan, Syafrida "Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Bandara Udara pada PT Persero Angkasa Pora II Bandar Udara Polonia Medan tahun 2017", *Thesis*, Sekolah Pasca Sarjana USU, Program Studi Kearsipan, h. 40.

⁵⁴ *Ibid*, h. 41-42.

6. Hikmah Sewa Menyewa

Islam menjelaskan dalam ayat Al-quran tentang hikmah *ijarah* yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam.⁵⁵ Adapun beberapa hikmah dari sewa menyewa diantaranya yaitu:

- a. Mendapatkan karunia dan ridha Allah SWT.

Ijarah merupakan hal yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia karena saling tolong menolong antara *mu'jir* dan *musta'jir* sehingga terciptanya rasa saling peduli sehingga mendapatkan karunia dari Allah SWT.

- b. Memperkuat tali silaturahmi antar sesama manusia.

Seiring dilakukannya sewa menyewa yang baik, maka terciptalah rasa persaudaraan dan tali silaturahmi antar sesama manusia.

- c. Sewa menyewa lebih banyak maslahatnya.

Seseorang yang keterbatasan dalam memiliki barang, bisa melakukan *ijarah* sebagai solusi dengan menyewa dan mengambil manfaat dari barang tersebut serta orang yang menyewakan mendapat kebaikan juga berupa biaya sewa.

- d. Meningkatkan perekonomian dikalangan masyarakat.

Sewa menyewa membantu para pelaku ekonomi atau masyarakat kalangan rendah dalam mendapatkan penghasilan.

- e. Menghindari sifat barang yang mubazir.

⁵⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 97.

Apabila seseorang membutuhkan suatu barang hanya dalam waktu sementara, maka bisa menyewa barang tersebut tanpa harus membelinya. Karena jika tidak terpakai, maka sifat barang akan mubazir.

7. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa

Ijarah menurut Hanafi merupakan akad yang lazim (mengikat), yang boleh di *fasakh* apabila ditemukan *uzur* di dalamnya seperti meninggal dunia atau gila. Sedangkan Jumhur Ulama menerangkan bahwa *ijarah* merupakan akad yang tidak bisa di*fasakh* kecuali dengan alasan yang jelas yang menjadikan akad tersebut menjadi *fasakh*, seperti adanya *'aib* (cacat) dan hilangnya manfaat.⁵⁶ Hal-hal yang menyebabkan batalnya sewa menyewa disebabkan sebagai berikut:

a. Hilangnya kecakapan dalam bertindak hukum.

Maksudnya adalah pihak yang melakukan sewa menyewa belum cakap.⁵⁷ Misalnya salah satu pihak yang melakukan sewa menyewa adalah anak-anak. Bisa jadi anak tersebut belum mengetahui sewa menyewa yang baik.

b. Terdapat kecacatan pada benda.

Maksudnya barang tersebut mengalami kecacatan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan perjanjian. Misalnya objek yang disewakan adalah mobil, dan mobil tersebut cacat sehingga tidak dapat digunakan kembali selama masa sewa, atau

⁵⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 328.

⁵⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*,....., h. 283.

mobil tersebut hilang, maka perjanjian sewa menyewa batal karna tidak terpenuhinya tujuan dari sewa menyewa yaitu mengambil manfaat dari objek sewa.

c. Hilangnya tujuan dari akad ijarah.

Maksudnya penyewa tidak dapat mengambil manfaat ataupun tujuan dari akad ijarah tersebut. Misalnya, seseorang menyewa mekanik untuk memperbaiki kendaraannya, namun bisa memperbaiki sendiri kendaraannya sebelum mekanik tersebut memulai tugasnya.

Untuk *ijarah* yang telah berakhir masa sewanya, maka penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Akad ijarah akan berakhir apabila tidak memenuhi beberapa kriteria diantaranya sebagai berikut:

- a. Objeknya hilang atau musnah, seperti kendaraan yang disewa namun hilang.
- b. Lama waktu dalam kesepakatan ijarah telah berakhir.
- c. Penyewa telah mendapatkan manfaat dari objek yang disewa, ataupun penyewa tidak memerlukan lagi manfaat objek tersebut.
- d. Wafatnya pihak yang berakad.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, Cet Ke- 1, 2010.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010.

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet Ke-1, 2010.

Ahmad Ibnu Hanbal Abu ‘Abdullah asy-Asyaibani , *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jilid 2.

Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram (Kitab Hadits Praktis dan Lengkap Fikih, Akhlak, dan Keutamaan Amal)*, Bandung: Sygma Publishing, 2011.

Asep Saefuddin Jahar et.al, *Hukum Keluarga, Pidana, Bisnis*, Jakarta : Kencana, 2013),

Buhran Bungain, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet III, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: CV. Rajawali Pers, 2014.

Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, Jakarta : CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.

Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, Cet ke- 2, 2013.

- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009.
- Newman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta, 2013.
- Ninie Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA)*, Jakarta: PT Rineka Cipta Cet ke-8, 2013.
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa dan Umum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhrawardi K Lubis Dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Susiadi, AS, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung : LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Riau: Suska Press, 2008.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, Jakarta : Gema Insani, Cet. Ke-1, 2011.

JURNAL

- Cornelius Prasetya Rona Kristian, *Evaluasi Sistem Penjualan Angsuran pada Columbus Unit Bisnis Solo*, Arsip Fakultas Ekonomi UNS, 25 Juli 2006.
- Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17, No.2, Tahun 2017.
- Gesta Gama Sevia, *"Tinjauan Hukum Islam tentang Biaya Tambahan Keterlambatan Pengembalian Sewa Menyewa Kendaraan (Studi pada CV Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung)"*, Publisher Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 27 Desember 2019.
- Mikha Ekapasi Putra Kawagami, *Deskripsi Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Dampak Ekonomi dan Potensi Lakalantas*, Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan (JIEP), Vol. 17, No.1, Maret 2017.

Mohamad Yoga Al Khozi, *“Tanggung jawab penyewa pada terjadinya Overtime dalam sewa menyewa mobil (Studi Kasus Jaya Transport Rent Car, Tour & Travel)”*, Publisher Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 20 Februari 2018.

Regina Maya Sherly, *“Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Mobil dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus M 16 Renka, 16 C Metro Barat)”*, Publisher Jurusan Muamalah IAIN Metro, Januari 2018.

Waty Tarigan, Syafrida "Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Bandara Udara pada PT Persero Angkasa Pora II Bandar Udara Polonia Medan ", *Thesis*, Sekolah Pasca Sarjana USU, Program Studi Kearsipan, tahun 2017.

MEDIA ONLINE

Kendaraan, tersedia di: <https://www.freshconsultant.co.id/2019/09/17/manajemen-kendaraan-operasional-perusahaan>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020.

Pengadaan barang, tersedia: <https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/07/kontrak-payung.html>, di akses pada tanggal 28 Juni 2020.

Purchase Order, tersedia di: <https://www.harmony.co.id/blog/pengertian-purchase-order-dan-fungsinya-dalam-bisnis>, diakses pada tanggal 11 Januari 2021.

DOKUMEN

Arsip Data PT Adi Sarana Armada.

Arsip Data PT Columbus Multi Sarana.

PERJANJIAN SEWA KENDARAAN ASSA DAN COLUMBUS No.
1200005637 /LEG/II/16 .

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Adi, Karyawan ASSA, dilaksanakan di Kantor ASSA, Bandar Lampung, 9 November 2020.

Wawancara dengan Bapak Amin, Karyawan Columbus, dilaksanakan di Kantor Columbus, Bandar Lampung, 22 Oktober 2020.

Wawancara dengan Bapak Eko, Karyawan Columbus, dilaksanakan di Kantor Columbus, Bandar Lampung, 24 Oktober 2020.

Wawancara dengan Bapak Pratama, Karyawan ASSA, dilaksanakan di Kantor ASSA, Bandar Lampung, 3 November 2020